

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang memiliki daerah yang sangat luas dan juga penduduk yang sangat banyak ini menggunakan system demokrasi. Namun terkhusus Indonesia demokrasi yang dianutnya adalah demokrasi yang berdasarkan pancasila, memang dalam penerapan sampai sekarang penerapan demokrasi di Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai pandangan oleh para ahli.

Semua warga Negara yang menganut demokrasi harus melaksanakan pemilihan umum, karena pemilihan umum adalah sebagian instrument terhadap pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Dalam pemilihan umum masyarakat mempunyai hak memilih dan dipilih sesuai ketentuan yang berlaku, masyarakat juga bebas mengutarakan pendapat dan juga memiliki kebebasan berbicara. Untuk pemilihan umum itu kadar demokratisnya juga sangat tergantung pada seberapa jauh pemilihan tersebut berlangsung secara bebas, jujur dan adil.

Saat manusia menjalani hidup dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya tanpa disadari manusia itu memiliki peran penting dalam system politik suatu Negara. Setiap warga Negara dalam kehidupan sehari-hari hampir selalu bersentuhan dengan aspek politik praktis. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau

tidak langsung dalam praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini hanya sebatas mendengar peristiwa politik seperti akan diadakannya pemilihan kepala daerah yang baru, dan jika secara langsung berarti orang yang mengetahui tentang adanya pemilihan kepala daerah tersebut ikut partisipasi dalam pemilihan itu.

Partisipasi politik yang merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* memaknai partisipasi politik sebagai :

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.¹

Kehidupan politik yang kita alami sehari-hari dalam interaksi antar warga Negara, rakyat dengan pemerintah sebenarnya telah menghasilkan bentuk bermacam-macam pendapat, pandangan dan pengetahuan terhadap perilaku-perilaku politik masyarakat yang akan berpengaruh dalam system politik itu sendiri. Maka dari itu setiap masyarakat diharapkan selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh Negara agar *input* yang diinginkan oleh pemerintah bisa tercapai dan sehingga *output*nya bisa berdampak baik bagi warga Negara.

¹ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hal. 4

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam system Negara demokratis, dan akhir-akhir ini sedang banyak dipelajari terutama dalam keterkaitannya dengan negara-negara berkembang.² Secara umum partisipasi politik adalah aktivitas seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, seperti ikut serta menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala Negara baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan juga ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya menunjukkan bahwa rakyat kurang menaruh perhatian atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Setelah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan social dan kehidupan pribadi dan social secara luas, maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.³

² Miriam Budiharjo, *Dasar—Dasar ilmu politik*. Jakarta : Gramedia Putaka Utama, 2008, hal. 367

³ Syahril Syarbaini dkk. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hal. 120

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam pemberian suara, dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan.

Sebenarnya saat ini sangat sulit untuk melakukan identifikasi budaya politik yang ada di Indonesia, karena sampai saat sekarang ini wujud simbolnya masih belum jelas. Akan tetapi masih ada suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk membahas tentang budaya politik di Indonesia adalah adanya terdapat suatu kelompok budaya yang dominan yang berasal dari kelompok etnis yang dominan pula keberadaannya di Indonesia yaitu kelompok etnis Jawa, yang mendiami bagian tengah dan timur dari pulau Jawa dan dengan populasi yang sangat padat ini akan mewarnai sikap, perilaku dan orientasi politik pemerintah.

Pada dasarnya masyarakat Jawa memiliki ciri-ciri sifat yang khas terhadap politik di Indonesia. Masyarakat Jawa cenderung untuk menghindarkan diri untuk tidak berada pada situasi konflik dengan pihak lain dan bersamaan dengan itu mereka juga cenderung selalu mudah tersinggung. Ciri-ciri ini identik dengan sifat sopan dan cara "Politik halus" sifat ini telah ditanamkan secara intensif dalam masyarakat Jawa sejak masa kanak-kanak. Itu semua bertujuan membentuk pola "tindak-tanduk yang wajar", yang perwujudannya berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan kasar menurut kebudayaan Jawa, padahal dalam politik memang harus ada yang

tersakiti pada akhirnya. Sifat yang seperti ini yang mengakibatkan orang Jawa kelihatan cenderung suka menutupi apa yang dia rasakan sebenarnya.

Beberapa tingkah laku yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa itulah yang dapat mempengaruhi budaya politik di Indonesia pada umumnya. Bagi masyarakat Jawa kekuasaan itu pada dasarnya bersifat konkrit, besarnya tetap, dan sumbernya homogen. Masyarakat Jawa pada dasarnya bersifat hierarkis karena kekuasaan itu berasal dari satu sumber maka bersifat konstan. Dan selama sumber kekuasaan itu masih memberikan kekuasaan maka kekuasaan itu akan tetap legitimate dan tidak perlu di persoalkan. Stratifikasi sosial di Jawa biasanya didasarkan pada akses kekuasaan bukan didasarkan pada atribut sosial. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara yang mempunyai kekuasaan yang di sebut kaum priyayi dengan kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan. Dari status sosial itu mempengaruhi cara berekspresi seseorang melalui gaya bahasa dengan tingkatan yang berbeda-beda.

Pembahasan tentang partisipasi politik tidak terlepas dari budaya politik setiap daerah. Budaya politik itu pada dasarnya merupakan suatu unsur dalam partisipasi politik, karena kecenderungan masyarakat yang masih ada kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung di suatu Negara, seperti pemilihan umum, ikut menyuarakan aspirasi (demonstrasi), dan juga ada kelompok penekan serta media massa yang selalu aktif dan kritis memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung. Sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik, tidak hanya pada tataran mengkritik dan memberi masukan kepada keputusan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tetapi terlibat juga

dalam implementasinya yaitu ikut mengawasi dan mengevaluasi dari kebijakan tersebut. Beberapa kegiatan itu merupakan bentuk dari partisipasi politik.

Budaya politik merupakan factor internal yang menyebabkan meningkatnya partisipasi politik dalam pemilihan Presiden tahun 2014, karena budaya politik itu merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat sejak dari dulu hingga sampai saat sekarang ini pada pemilihan umum. Dengan budaya politik yang tinggi sebenarnya mempermudah KPU dalam kerjanya sebagai sosialisasi politik karena memang sudah dari dalam diri masyarakat itu tertanam jiwa bahwa menggunakan hak pilih itu merupakan sebuah keharusan dan tanpa paksaan siapapun.

Di Negara yang menganut system demokrasi, pemilihan umum kepala Negara atau Daerah dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Masyarakat ikut serta dalam penentuan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi kepala Negara/Daerah dengan cara menggunakan hak pilih dia dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara, dan itu adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang ada. Di Indonesia sebagai penganut system demokrasi telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan umum Legislatif (Pileg), pemilihan Presiden dan wakil presiden (Pilpres). Pada tahun 1999 adalah pemilu pertama di era reformasi, dan itu mendapat apresiasi dunia internasional sebagai penyelenggaraan pemilu secara langsung yang jujur dan adil.

Di Indonesia pada tahun 2014 ini banyak yang mengatakan bahwa tahun politik, karena dalam tahun 2014 ini Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum

legislative dan presiden yang baru. Pemilihan presiden tahun ini menjadi sorotan utama karena di Indonesia akan memiliki Presiden yang baru setelah sepuluh tahun kebelakang di pimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memenangkan pemilihan presiden sebanyak dua periode yaitu tahun 2004-2009 dan 2009-2014.

Pada pemilihan presiden tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak suaranya sekitar 134.953.967 orang yang menggunakan hak pilih dari 188.461.971 orang yang terdaftar menjadi daftar pemilih tetap menurut data KPU⁴. Ini membuktikan bahwa antusias masyarakat terhadap pesta demokrasi ini sangat tinggi dengan bukti bahwa lebih dari 70% yang menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara.

Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga melaksanakan pemilihan presiden pada tanggal 9 juli 2014. Di Bantul terdiri yang terdiri dari 17 Kecamatan, dan 75 Desa dan disetiap desa akan dibagi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dimana akan dilaksanakan penggunaan hak pilih oleh warga. Memang setiap daerah itu memiliki tingkat partisipasi yang berbeda-beda, terbukti bahwa di Bantul sendiri Kecamatan Banguntapan termasuk yang tinggi tingkat partisipasinya dalam pemilihan Presiden dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 67.143 pemilih dari 80.994 yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁵

⁴ <http://data.kpu.go.id/ss89.php>. selasa, 7 oktober 2014. Pukul 22.56 WIB

⁵ Arsip Kpud-Bantul Pemilihan Presiden 2014. Berdasarkan kertas model DB1 PPWP & A.3.3-PPWP

Masyarakat banguntapan sebagian besar merupakan asli penduduk pribumi atau masyarakat Jawa asli. Saat kecil dulu mereka telah ditanamkan kebudayaan Jawa seperti sopan santun dan lembut oleh orang tuanya hingga turun temurun sampai saat sekarang ini, maka dari itu akan berpengaruh juga terhadap setiap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan politik.

Di Banguntapan sendiri yang masyarakatnya sebagian besar adalah etnis Jawa, pada dasarnya mereka juga menerapkan kebudayaan Jawa dalam kegiatan politik yang mereka ikuti. Dengan budaya Jawa dengan masyarakatnya yang hierarchies, masyarakat banguntapan juga menggunakan sistem tersebut karena di Jogja sendiri masih sangat kental dengan system pemerintahan melalui Raja. Sri Sultan Hamengkubuwono X dianggap sebagai raja yang memimpin DIY yang ditetapkan juga sebagai Gubernurnya.

Pengaruh Sultan di Jogja sangatlah besar kepada rakyatnya, rakyatnya sangat menghormati segala keputusan yang telah diambil termasuk dalam keikutsertaan dalam politik. Banguntapan sendiri adalah salah satu kecamatan yang berada di DIY yang berarti masyarakat yang sangat tunduk dan hormat juga terhadap Sultan. Dalam ranah Politik, Sultan juga berperan terhadap kegiatan politik dan juga dalam partisipasi politik terhadap Pemilu. Sehingga masyarakat DIY secara psikologi juga akan mempengaruhi partisipasi politik terhadap Pemilihan Presiden. Memang akan ada terlihat korelasi antara budaya politik Jawa dengan masyarakat yang hierarkies yang berkembang dengan tingkat partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden kemarin.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaruh budaya politik yang ada di Kecamatan Banguntapan yang akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian pokok dari kegiatan penelitian, sehingga perumusannya perlu kejelasan dan ketegasan agar proses penelitian bisa benar-benar terarah dan terfokus pada permasalahan yang hendak diteliti.⁶

Setelah memaparkan latar belakang secara singkat diatas tadi, maka rumusan masalah yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Budaya Politik masyarakat Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh Budaya Politik tersebut terhadap partisipasi masyarakat dalam PILPRES 2014?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk dari Budaya Politik yang ada di Kecamatan Banguntapan.

⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Bina Aksara, 1996, hal. 19

2. Untuk mengukur sejauh mana Budaya Politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat di kecamatan Banguntapan pada pemilihan presiden tahun 2014.
3. Sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana fakultas ilmu social dan ilmu politik prodi ilmu pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap agar penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang seara umum seperti :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat membantu memperdalam kajian ilmu pemerintahan serta ilmu politik yang diperoleh selama menjadi mahasiswa fakultas ilmu social dan ilmu politik.
2. Bagi Akademik, peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas penelitian di bidang ilmu social dan ilmu politik, terfokus mengenai studi tentang budaya politik dan partisipasi politik.
3. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mendalami kajian tentang budaya politik dan partisipasi politik.

E. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian unsur yang juga tidak kalah penting adalah kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Karena bagi peneliti teori ini menjadi acuan landasan berfikir dalam menyoroti masalah yang akan dibahas, oleh

karena itu diperlukan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan yang dimana teori – teori ini merupakan serangkaian konsep dan definisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan dengan konsep. Adapun kerangka teori pada permasalahan ini adalah :

1. Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik yang berkembang dalam suatu Negara dilatar belakangi oleh situasi, kondisi dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu Negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, perbedaan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat akan menimbulkan perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Budaya politik yang berkembang disetiap Negara sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh karakter budaya politiknya masing-masing. Dengan kata lain, budaya politik itu akan membentuk pola tingkah laku setiap orang yang akan menjadi orientasinya dalam tujuan politik yang mereka inginkan.

Berikut pengertian budaya politik menurut beberapa ahli :

1. Gabriel A. Almond & Sidney Verba

Mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap

peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.⁷ Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga Negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

2. Samuel Beer

Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah bagi rakyatnya. Bagi Samuel Beer ini mendefinisikan budaya politik lebih mengedepankan kepada tuntutan kepada pemerintah agar bisa menjalani system politik sebagaimana mestinya, dan pemerintah harusnya lebih paham dan mengerti bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat dalam segala aspek dan juga dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan sebagaimana mestinya.

3. Marbun

Budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang, dan budaya politik ini lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakan dalam masyarakat. Jadi

⁷ Gabriel A Almond dan Sidney Verba. *Budaya Politik, tingkah laku politik dan demokrasi di lima Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990, Hal. 14

bagi Marbun, budaya politik ini tidak hanya pada focus tuntutan yang diberikan kepada system politik saja namun Marbun lebih menjelaskan bahwa Budaya Politik lebih akan mempengaruhi jiwa masyarakat yaitu dalam aspek psikologis yang hanya akan ada pada setiap diri masyarakat saja.

4. Rasudi Suminta Pura

Budaya politik tiada lain adalah pola tingkah laku setiap individu, serta orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati para anggota suatu sistem politik.⁸ Bagi Rasudi Budaya politik akan membahas tentang Hakikat dan ciri-ciri yang menyangkut masalah nilai-nilai akan prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan. Budaya politik itu akan mempengaruhi Sikap warga negara terhadap orientasi politik yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Sikap dan orientasi politik sangat mempengaruhi bermacam-macam tuntutan, cara menuntut, respon maupun dukungan terhadap golongan elit politik dan rezim yang berkuasa.

5. Austin Ranney

Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik yang sedang tergabung dalam satu kesatuan sistem politik.

⁸ <http://risesora-sheilla.blogspot.com/2012/08/tugas-pkn-pengertian-budaya-politik.html>. 7 oktober 2014. pukul 22.45 WIB

b. Bentuk – Bentuk Budaya Politik

1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan

Setiap masyarakat memiliki kecenderungan sikap yang berbeda-beda dalam tingkah lakunya terhadap politik. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap ”militan” atau sifat ”toleransi”.

1) Budaya politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah, dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

1) Budaya politik Parokial

yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Menyangkut budaya yang terbatas pada wilayah lingkup yang kecil. Karena wilayah yang terbatas acapkali pelaku politik sering memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri. Yang menonjol dalam budaya politik adalah kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan\kekuasaan politik dalam masyarakat.

2) Budaya Politik Kaula

yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan.

3) Budaya Politik Partisipan

yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk

memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan.⁹

2. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.¹⁰

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan pendapat beberapa ahli :

1. Keith Fauls

Dalam bukunya *Political Sociology: A Critical Introduction*, Keith Fauls memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara

⁹ Septi Meliana, *Budaya Politik & Partisipasi Politik*. Medan : USU, 2011.

¹⁰ Miriam Budiharjo, *Op, Cit.*, hal. 367

aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.¹¹ Bagi Keith Fauls batasan yang dikemukakan dalam partisipasi politik mencakup pada sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan tanpa harus membahas dimensi lain yang ada diluar batasan yang diberikannya.

2. Michael Rush dan Philip Althoff

Dalam buku Sosiologi Politik, Rush dan Althoff memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan dalam aktivitas politik pada suatu sistem politik”.¹² Bagi Rush dan Althoff cakupannya lebih luas karena memberi batasan pada system politik yang jika diartikan bisa menjadi luas apa saja cakupan yang ada pada system politik. Dengan demikian batasan itu melingkupi semua instrumen dalam pengertian politik yang ada.

3. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

Dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Huntington dan Nelson membuat batasan partisipasi politik sebagai “kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah”.

¹¹ Keith Fauls. *Political Sociology : A Critical Introduction.*, Dalam Dr.Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 180

¹² Michel Rush Dan Philip Althoff, *Sosiologi Politik .*, Dalam Dr.Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 180

Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau seponatan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, fektif atau tidak efektif.”¹³

Dengan demikian, pengertian Huntington dan Nelson dibatasi beberapa hal, yaitu: *pertama*, Huntington dan Nelson mengartikan partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, keefektifan politik, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik. *Kedua*, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini didasarkan pada pejabat-pejabat yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negar biasa. *Ketiga*, kegiatan politik adalah kegiatan yang dimaksud untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara mengubah aspek-aspek sistem politik. Dengan itu protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pembrontak untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik. *Keempat*, partisipasi juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. *Kelima*, partisipasi politik

¹³ Samuel P Huntington Dan Joan M. Nelson, *op.cit*, hal 4

dilakukan langsung atau tidak langsung, artinya langsung oleh pelakunya sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan ke pemerintah.

b. Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Peran serta atau partisipasi masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut :

a. Kegiatan Pemilihan (*Electoral Activity*)

Yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah dalam bentuk sumbangan-sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam setiap kegiatan kampanye, mengajak seseorang atau beberapa orang untuk mendukung dan memilih suatu partai atau calon pemimpin, memberikan hak suara dalam kegiatan politik, dan mengawasi perhitungan suara.

b. *Lobbying*

Yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah maupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya dalam masalah tertentu.

c. Kegiatan Organisasi (*Organizational Activity*)

Yaitu keterlibatan warga masyarakat kedalam organisasi social politik, apakah dia sebagai pemimpin, aktivis atau hanya sebagai anggota biasa.

d. Mencari Koneksi (*Contacting*)

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung dengan pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.

e. Tindak Kekerasan (*Violence*)

Yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, seperti dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan terhadap barang atau individu.

Menurut versi lain, bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat stabilitas system politik, integrasi kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga Negara. Dalam buku perbandingan Sistem Politik yang disunting oleh Mas'ood dan MacAndrews, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- 2) Partisipasi politik nonkonvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lezim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.¹⁴

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada table berikut.

¹⁴ Gabriel A Almond. *Perbandingan Sistem Politik* disunting oleh Mas'ood dan MacAndrew(1981), dalam Dr.Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 186

TABEL 1.1

Bentuk – Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none">• Pemberian suara• Diskusi politik• Kegiatan kampanye• Membentuk & bergabung dalam kelompok kepentingan• Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan petisi• Berdemonstrasi• Konfrontasi• Tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, & pembakaran)• Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan & pembunuhan)• Perang gerilya & revolusi

Sumber: Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews¹⁵

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilihan Umum (PEMILU)

Pemilihan umum merupakan suatu proses demokrasi dengan cara memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi

¹⁵ *Ibid*, Hal 186

perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau juga bisa dikatakan penyerahan kedaulatan atau partai yang dipercayai. Orang-orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan yang *representative*.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Berikut adalah pengertian pemilu menurut beberapa ahli :

1. Ramlan

Pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya.

2. Ali Moertopo

Adalah sarana yang tersedia untuk rakyat guna melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan azas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

3. Suryo Untoro

Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara yang telah memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan atau jabatan politis lainnya.¹⁶

Dalam PEMILU terdapat asas yang harus ditaati, asas tersebut berdasarkan amanat UU no 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden¹⁷ yaitu meliputi :

1. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

2. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

3. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun.

4. Rahasia

¹⁶ <http://dilihatya.com/762/pengertian-pemilu-menurut-para-ahli> 8 oktober 2014. pukul 1.17 WIB

¹⁷ UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

b. Sistem Pemilu

Terdapat dua system pemilihan umum yang dikenal selama ini, seperti :

a) Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilu yang paling tua dan di dasarkan kepada kesatuan geokrafis, dimana satu kesatuan geokrafis mempunyai satu wakil di parlemen. System distrik sering dipakai dalam Negara yang mempunyai system dwipartai. Namun system distrik juga dapat dilaksanakan pada suatu Negara yang

menganut sistem multipartai seperti di Malaysia. Pada hakikatnya sistem distrik mendorong partai-partai untuk berkoalisi mulai dari menghadapi pemilu.

Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain.

b) Sistem Proporsional

Dalam sistem ini persentase kursi dilembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik (parpol) sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistem ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.

Dalam sistem proporsional terbagi menjadi dua macam, yaitu terbuka dan tertutup. Sistem proporsional terbuka ialah memberikan keleluasaan bagi pemilih untuk memilih nama calon yang akan mereka pilih. Karena selain disodori gambar partai dalam sistem proporsional terbuka pemilih juga disodori daftar nama-nama calon. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sistem

tertutup pemilih hanya disodori gambar partai sedangkan nama-nama anggota legislatif yang akan duduk di parlemen akan ditentukan oleh partai politik itu sendiri sesuai dengan prosentase kursi yang diperoleh.

c. Pemilu Presiden 2014 di Indonesia

Rakyat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, tidak sekedar menjadi obyek, masyarakat juga dapat menjadi subyek juga. Masyarakat juga dapat ikut serta dalam pencalonan anggota legislatif, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga bisa mencalonkn diri, asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana diundangkan dalam UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan UU tentang Pemilu Presiden (Pilpres).

Warga masyarakat yang bermaksud menjadi calon anggota DPD, cukup dengan melampirkan daftar nama, tandatangan dan atau fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) para pendukungnya sejumlah yang dipersyaratkan UU. Selanjutnya, kita tinggal mendaftarkan ke KPU setempat. Jadi sesuai dengan bunyi dalam UUD 1945 dan sesuai dengan hak asasi kita sebagai bangsa yang merdeka serta berdaulat, masyarakat memiliki hak memilih dan dipilih.

Arti memilih sebagaimana sudah dijelaskan diantaranya adalah dengan memberikan tanggapan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014. Di Indonesia Pemilihan presiden menjadi berita utama disetiap media cetak maupun televisi, karena itu adalah pesta rakyat Indonesia yang diselenggarakan lima tahun sekali dan juga setelah itu Indonesia memiliki kepala Negara yang baru periode 2014-2019.

Pertarungan politik untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia sangat hangat, karena memang hanya ada dua kubu yang dominan yaitu kubu Jokowi dengan koalisinya serta kubu Prabowo dengan koalisi yang dimilikinya. Pertarungan politik yang mereka lakukan sangat menyita perhatian perhatian semua orang karena memang media televisi setiap hari selalu memberitakan tentang gejolak politik yang terjadi, bahkan pertarungan dua kubu tersebut sampai ke meja Mahkamah Konstitusi karena diduga ada keurangan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan presiden berlangsung.

Setelah melakukan proses yang panjang bahkan sampai dibawa ke Mahkamah konstitusi maka disana menyatakan bahwa pihak Jokowi yang diamanahi oleh rakyat Indonesia untuk menjabat sebagai kepala Negara lima tahun kedepan.

F. Definisi Konseptual

a. Budaya Politik

Mendefinisikan Budaya politik tidaklah gampang, Gabriel A. Almond & Sidney Verba mengartikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Jadi jika bisa sedikit disimpulkan

bahwa budaya politik adalah kumpulan dari pengetahuan masyarakat atau individu yang akan membentuk suatu pola atau tingkah laku yang akan mempengaruhi orientasi politiknya kedepan.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Ada beberapa bentuk Budaya Politik yang telah dikenalkan dan dipahami selama ini, diantara lain :

a) Budaya Politik Militan.

Budaya politik militant adalah suatu kondisi masyarakat yang mana menganggap bahwa suatu perbedaan itu adalah sebuah kesalahan dan itu semua tidak boleh terjadi karena menurut kelompok masyarakat yang menganut budaya politik militant ini sebuah perbedaan adalah usaha jahat dan menantang.

b) Budaya politik Toleran.

Budaya politik toleran merupakan kebalikan dari budaya politik sebelumnya yaitu budaya politik militant. Dimana suatu kondisi

masyarakat yang kebudayaannya lebih mengedepankan bentuk kerjasama dan musyawarah ketimbang hanya mengedepankan kepentingan pribadi.

c) Budaya Politik Parokial.

Budaya politik parokial adalah suatu kondisi masyarakat yang tingkat partisipasinya sangat rendah yang memang disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya. Masyarakat masih tidak menaruh minat pada obyek penelitian luas dan juga tidak memiliki harapan yang luas terhadap sistem politik.

d) Budaya Politik Kaula.

Budaya politik Kaula adalah suatu keadaan dimana masyarakat sudah sedikit lebih maju baik di tingkat pendidikan maupun ekonominya serta masyarakatnya telah menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya. Namun sebagai aktor politik sikap masyarakatnya masih pasif, artinya tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Mereka tidak berdaya mempengaruhi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

e) Budaya Politik Partisipan.

Budaya politik Partisipan ditandai dengan kesadaran politik masyarakat yang sangat tinggi. Masyarakat sangat menjalankan perannya agar sistem politik bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, dimana kondisi masyarakat menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dan bisa mempergunakan hak itu serta menanggung kewajibannya. Orientasi

masyarakat terhadap keseluruhan obyek politik, baik itu obyek umum, obyek obyek *input*, *output*, dan pribadinya sebagai partisipan aktif sangat tinggi. Dan menurut saya budaya politik seperti ini yang diharapkan oleh setiap Negara agar system politik dengan demokrasiya berjalan baik dan sebagaimana mestinya.

b. Partisipasi Politik

Pengertian Partisipasi Politik Dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Samuel Huntington dan Nelson membuat batasan partisipasi politik sebagai “kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah”. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, fektif atau tidak efektif.

Ada beberapa bentuk-bentuk Partisipasi Politik yang kita kenal, diantara lain:

a) Kegiatan Pemilihan (*electoral activity*)

Adalah segala macam bentuk kegiatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan pemilihan. Seperti mengajak orang untuk ikut pemilihan, atau sumbangan-sumbangan saat kampanye berlangsung.

b) *Lobbying*

Adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menemui atau menghubungi orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan orang tersebut dalam masalah tertentu.

c) Kegiatan Organisasi (*Organizational Activity*)

Berperan aktif dalam suatu organisasi merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik karena seiring berjalannya waktu organisasi tersebut akan menjalankan fungsinya termasuk organisasi yang bergerak dibidang social politik.

d) Mencari Koneksi (*Contacting*)

Adalah suatu bentuk partisipasi politik dimana masyarakat menemui pejabat pemerintah atau tokoh politik untuk membantu mempermudah yang menjadi tujuan masyarakat tersebut baik itu dilakukan individu maupun kelompok orang.

e) Tindak Kekerasan (*Violence*)

Bentuk partisipasi politik ini sangat tidak disarankan oleh siapapun, karena dengan tindak kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah akan merugikan salah satu pihak dan tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi.

c. Pemilihan Umum Presiden

Untuk pengertian Pemilu Presiden itu sendiri adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia setiap lima tahun sekali dan hanya yang telah memiliki syarat-syarat tertentu yang bisa mendapatkan hak pilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sesuai dengan kehendak hati masing-masing individu tanpa paksaan siapapun.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis akan sedikit menjelaskan tentang tipe budaya politik yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden berdasarkan bentuk dari budaya politik yang berkembang di masyarakat.

1. Berdasarkan Sikap Yang Ditunjukkan

Setiap masyarakat memiliki kecenderungan sikap yang berbeda-beda dalam tingkah lakunya terhadap politik. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap "militan" atau sifat "toleransi".

1) Budaya politik Militan

Budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Dengan budaya militan ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi yang ada.

Adapun ciri-ciri dari budaya politik militan adalah (1) masyarakat tidak senang dengan yang nama perbedaan apapun itu bentuknya. (2) masyarakat lebih mengedepankan tindak kekerasan jika menemui segala bentuk perbedaan. (3) bila terjadi krisis atau masalah, maka yang dicari adalah kambing hitamnya ketimbang mencari solusi untuk memecahkan masalah.

2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik dimana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Budaya politik toleransi mempengaruhi tingkat kedewasaan pemilih dalam partiipasi politiknya.

Ciri-ciri dari budaya politik toleran adalah (1) masyarakat lebih mengedepankan rasa kebersamaan untuk musyawarah. (2) masyarakat berpemikiran berpusat pada ide atau gagasan yang harus dinilai. (3) sikap netral dan kritis terhadap ide orang tapi bukan curiga kepada orang tersebut.

2. Berdasarkan Orientasi Politiknya

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :

1) Budaya politik Parokial

yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan yang masih relatif rendah).

Cirri-ciri dari budaya politik Parokial adalah (1) masyarakat tidak menaruh minat terhadap obyek politik. (2) masyarakat masih tertinggal dalam bidang pendidikan dan ekonomi. (3) masyarakat tidak memiliki harapan terhadap system politik. (4) berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana.

2) Budaya Politik Kaula

yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif. Anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya.

Cirri-ciri dari budaya politik kaula adalah (1) kondisi masyarakat sedikit sudah maju pada bidang social dan ekonominya. (2) masyarakat sudah memiliki kesadaran dan minat terhadap obyek politik. (3) peran masyarakat sebagai actor politik masih minim atau bisa dikatakan pasif. (4) masyarakat tidak banyak member masukan dan tuntutan kepada pemerintah.

3) Budaya Politik Partisipan

yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan.

Cirri-ciri budaya politik partisipan adalah (1) masyarakat sangat partisipatif terhadap semua obyek politik. (2) masyarakat berpeeraan sebagai aktivis dalam segala bentuk kegiatan politik. (3) masyarakat tidak menerima begitu saja semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.¹⁸ Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variable. Variable-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistic.¹⁹ Dengan pendekatan kuantitatif maka peneliti akan menyajikan serta menganalisis data dan fakta secara sistematis sehingga hasil dari penelitian ini mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam konteks penelitian ini variabelnya adalah budaya politik sebagai independen terhadap variable partisipasi politik dalam pemilu Presiden sebagai dependen.

b. Populasi & Sample

a) Populasi

Populasi adalah seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian.²⁰

¹⁸ Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal.4.

¹⁹ Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Medi Group, 2011, Hal. 38

²⁰ *Ibid.*, Hal. 147

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum presiden 2014 di kecamatan Banguntapan.

b) Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data.

Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan *Stratified Random Sampling* yaitu suatu teknik sampling dimana populasi kita bagi kedalam sub populasi (strata), karena mempunyai karakteristik yang heterogen dan heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan terhadap pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil dengan cara ini. Dari daftar populasi yang diteliti yakni Masyarakat Kecamatan Banguntapan yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilihan Presiden tahun 2014.

Dalam menentukan jumlah untuk kuisioner yang akan disebar, penulis menggunakan rumus *Taro Yamane*²¹, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N (d)^2 + 1}$$

²¹ Jalaluddin Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal. 81

Keterangan :

n : Jumlah sample

N : Jumlah Populasi

d : Presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

Jumlah DPT di Kecamatan Banguntapan sebanyak 80.409 jiwa. Maka sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak :

$$n = \frac{80.409}{80.409(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{80.409}{80.409(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{80.409}{805.09}$$

$$n = 99.87$$

Jadi sample yang digunakan untuk menjadi responden dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 orang.

Peneliti telah membagi penyebaran kuisioner berdasarkan Desa yang ada di Kecamatan Banguntapan yang berjumlah delapan Desa, Yaitu Desa Jagalan, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Baturetno, Singosaren, Potorono, Banguntapan. Berdasarkan Tipe Budaya politik yang telah dijelaskan pada kerangka teori diatas maka kuisioner ini diklasifikasikan pada Tiga kelompok Umur seperti anak muda yang mewakili pemilih pemula yaitu rentan umur 17-21 tahun, orang dewasa yang

berumur 22-40 Tahun dan yang berumur 41 tahun keatas penulis masukkan kepada kelompok pemilih tua.

Untuk penyebaran dilapangan tidak setiap desa mendapatkan jumlah kuisisioner yang sama, karena memang setiap desa tingkat partisipasi dalam PILPRES 2014 itu berbeda-beda. Untuk Desa yang tingkat partisipasinya menapai 80% maka peneliti akan menyebarkan sebanyak 13 angket per Desa karena memang yang mencapai 80% tingkat Partisipasinya pada PILPRES 2014 ada 6 Desa, yaitu Desa Jagalan, Jambidan, Wirokerten, Tamanan, Baturetno, Singosaren. Sedangkan 2 Desa yaitu Desa Potorono dan Banguntapan tidak mencapai 80% maka peneliiti akan menyebar sebanyak 11 kuisisioner per Desa.

Agar penyebaran kuisisioner bisa mewakili criteria umur yang telah ada, maka peneliti juga akan membagi kuisisioner berdasarkan umur di setiap Desa untuk bisa menjadi sample untuk mewakili dari populasi yang ada. Peneliti melakukan cara ini karena memang populasi dari penelitian ini adalah heterogen jadi peneliti harus bisa membagi kuisisioner secara merata sehingga bisa mewakili setiap populasi yang ada berdasarkan criteria umur juga.

Untuk lebih jelasnya tingkat partisipasi di kecamatan Banguntapan bisa dilihat pada table berikut :

TABEL 1.2
Data Tingkat Partisipasi Pada PILPRES 2014 di Kecamatan Banguntapan & jumlah Penyebaran Angketnya

NO	Desa	Tingkat Partisipasi	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Jumlah Angket
1	Jagalan	84%	2.484 Orang	2.104 Orang	13 Orang
2	Jambidan	84%	7.138 Orang	6.031 Orang	13 Orang
3	Wirokaten	83%	9.728 Orang	8.039 Orang	13 Orang
4	Tamanan	81%	9.575 Orang	7.778 Orang	13 Orang
5	Baturetno	80%	12.160 Orang	9.817 Orang	13 Orang
6	Singosaren	80%	3.011 Orang	2.419 Orang	13 Orang
7	Potorono	78%	9.785 Orang	7.677 Orang	11 Orang
8	Baanguntapan	77%	30.120 Orang	23.278 Orang	11 Orang

Sumber : DA1-PPWP-340212-BANGUNTAPAN

c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian bisa menggunakan beberapa cara dengan tipe seperti :

1. Data Primer

Data primer yang didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara menyebarkan angket/kuesioner kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Responden menjawab dengan memilih pilihan jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan (pertanyaan tertutup). Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti :

1) Wawancara

Peneliti dalam memperoleh data untuk penelitian ini melalui Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang mempunyai pengaruh di daerah tempat penelitian ini terjadi guna untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

TABEL 1.3
Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	R. Narmoney Sawelas Putra, S.Sos	Ka. Seksi kemasyarakatan Kecamatan Banguntapan
2	Bapak Suyadi	RT 01 Desa Jambidan
3	Bapak Paimin	RT 02 Desa Baturetno
4	Bapak Hartono	RT 02 Desa Potorono
5	Ibuk Atik	Dukuh I Singosaren

2) Kuisisioner/angket

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya untuk hal-hal yang

diketuinya.²² Dalam penelitian ini kuisiner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuisiner tersebut akan berbentuk angka-angka, table-tabel, analisa statistic dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Tujuan pokok untuk pembuatan kuisiner adalah untuk (a) memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan (b) memperoleh informasi dengan validitas yang tinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber original. Sumber data sekunder meliputi surat kabar, interpretasi atau pembahasan tentang materi original. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang didapat dari KPUD Kabupaten Bantul yang didapat oleh peneliti melalui internet, buku-buku, majalah, jurnal dan arsip yang ada hubungan dengan penelitian kali ini. Adapun jenis data sekunder yang dimaksud adalah :

1) Dokumentasi/kepuustakaan

Kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai sumber. Teknik ini digunakan untuk mendukung penelitian dengan cara mencari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Dokumen yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-

²² Suharsimi Arikunto. *prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hal. 10

undangan dan data dari internet yang koheren dengan topik penelitian. Adapun data yang digunakan diantara lain :

TABEL 1.4
Daftar Dokumen Yang Digunakan

No	Nama Dokumen	Sumber
1	Kertas Model DB1 PPWP & A.3.3-PPWP	Kantor Kecamatan Banguntapan
2	DA1-PPWP-340212-BANGUNTAPAN	Kantor Kecamatan Banguntapan
3	UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Internet
4	UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat	Internet

d. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data peneliti tidak hanya menggunakan intepretasi terhadap data yang sudah diperoleh, tetapi peneliti juga menggunakan instrumen bantuan berupa aplikasi statistik yakni SPSS. Penggunaan SPSS dimaksudkan untuk meminimalisir tingkat kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi data primer yang bersifat persentase serta untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan hasil olahan data berbentuk Diagram atau Grafik.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kuantitatif. Data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian dikumpulkan dan disusun, dianalisa dan disajikan dengan bantuan aplikasi SPSS tadi untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada di kecamatan Banguntapan. Data-data tersebut diolah

secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.